

Kebakaran Hutan Dahsyat Landa Lebanon Utara

BEIRUT (IM)— Sejumlah kebakaran yang terjadi di Lebanon utara telah menghancurkan hutan pinus dan banyak desa di wilayah tersebut. Kobaran api telah memaksa beberapa warga untuk meninggalkan rumah mereka, sementara setidaknya satu petugas pemadam kebakaran tewas dalam memadamkan api.

Cuaca panas dan angin kencang telah melanda provinsi utara Akkar di negara itu, memicu beberapa kebakaran hutan. Pada Rabu (28/7), kebakaran besar terjadi di dekat Kota Qoubayat, pemukiman Kristen terbesar di wilayah tersebut.

Rekam dari tempat kejadian menunjukkan api menyebar dengan sangat cepat melintasi pegunungan berhutan, melahap hutan pinus Lebanon yang ikonik. Api dengan cepat mendekati kota, serta desa-desa lain di daerah itu.

Api telah memaksa banyak orang untuk meninggalkan rumah mereka, bahkan berlari menembus lanskap yang terbakar dalam upaya menyelamatkan nyawa, barang-barang, dan ternak mereka.

Foto-foto yang beredar di media sosial menunjukkan api terbuka mendekati daerah pemukiman, dengan dinding api terlihat dalam beberapa puluh meter dari rumah.

Petugas pemadam kebakaran, serta militer negara, telah dikirim ke daerah tersebut untuk memerangi api. Setidaknya satu petugas pemadam kebakaran sukarelawan tewas dalam upaya itu setelah menderita cedera di kepala, menurut laporan kantor berita Lebanon yang dilansir RT.

Presiden Michel Aoun telah menugaskan panglima militer dan pertahanan sipil untuk mencari bantuan dari negara tetangga Siprus. Pada tahun-tahun sebelumnya, negara kepulauan itu berulang kali mengirim helikopter pemadam kebakaran jika kebakaran hutan di Lebanon tak terkendali. ● gul



UNJUK RASA PEKERJA TAMBANG AMERIKA

Anggota Serikat Pekerja Tambang Amerika (UMWA) dan pemimpin tenaga kerja lainnya menundukkan kepala untuk berdoa saat berjaga dalam mogoknya serikat kerja di Warrior Met Coal Mine, di luar BlackRock's Headquarters di New York City, Amerika Serikat, Rabu (28/7).

Biden Diminta Tidak Keluarkan Visa untuk Raisi

Presiden terpilih Iran, Ebrahim Raisi, dianggap sebagai pelanggar hak asasi manusia yang secara konsisten mendukung hukuman tidak manusiawi terhadap rakyat Iran

WASHINGTON (IM)— Sejumlah senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik mendesak Presiden Joe Biden tidak mengeluarkan visa bagi presiden Iran terpilih Ebrahim Raisi untuk menghadiri Sidang Umum PBB.

Senator Tom Cotton, Ted Cruz, Chuck Grassley, Rick Scott, Marco Rubio, dan Marsha Blackburn meminta Presiden Joe Biden untuk melarang presiden terpilih Iran, Ebrahim Raisi, memasuki AS. Permintaan itu dituangkan dalam sebuah surat yang ditujukan langsung kepada Biden.

Dalam suratnya, para senator Partai Republik itu menyebut Raisi sebagai pelanggar hak asasi manusia yang secara konsisten mendukung hukuman tidak manusiawi terhadap

rakyat Iran. Mereka juga menegaskan bahwa presiden terpilih Iran itu terus membuat rakyat Iran dituntut di luar hukum, peniksaan dan eksekusi.

"Ebrahim Raisi harus tetap dikenai sanksi berdasarkan undang-undang AS. Jika Sidang Umum PBB memperbaharui rencananya saat ini untuk mengizinkan beberapa kehadiran langsung, Gedung Putih harus menolak Raisi dan visa para pemimpin Iran lainnya untuk hadir," tulis para senator seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (29/7).

Anggota parlemen Partai Republik itu menyebut apa yang mereka gambarkan sebagai "presiden kuat" untuk menolak visa masuk ke pemimpin asing, terutama mengutip kasus yang melibatkan

warga negara Iran.

Presiden terpilih Iran diduga menjadi bagian dari apa yang disebut Komisi Kematian dari tahun 1988, yang dituduh memerintahkan penangkapan dan eksekusi ribuan lawan politik Teheran pada saat itu sesuatu yang dibantah keras oleh republik Islam itu.

Raisi dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden ke-13 Iran pada bulan Juni, yang legalitasnya dengan cepat dipertanyakan oleh AS. Teheran, bagaimanapun, mencap kritik AS terhadap pemilu Iran sebagai campur tangan, mencatat bahwa Washington tidak memiliki wewenang untuk mengungkapkannya tentang pemilu di negara lain.

Raisi, yang merupakan mantan hakim ketua yang memiliki hubungan dengan ulama dan Pemimpin Tertinggi agama negara itu, dijadwalkan akan menjabat pada 5 Agustus.

Para senator Republik mencatat bahwa ada preseden bagi AS dalam menolak visa bagi pejabat asing yang mencoba menghadiri acara-acara diplomatik, khususnya di PBB, meskipun pertemuan-pertemuan PBB diadakan dengan

tujuan menyediakan platform bagi para pemimpin dunia untuk menemukan kesamaan bahasa pada berbagai isu global yang penting.

Pada tahun 2014, Duta Besar Iran Hamid Aboutalebi, yang diklaim oleh anggota parlemen Partai Republik terlibat dalam penyanderaan diplomatik Amerika pada tahun 1979, tidak diizinkan masuk ke Amerika Serikat oleh pemerintahan Obama.

Pada tahun 2020, AS menolak visa untuk Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif, yang diperkirakan akan berpidato di Dewan Keamanan PBB pada saat itu.

Diplomat Rusia yang ditugaskan di PBB juga menghadapi masalah visa ketika mencoba menghadiri acara-acara PBB, seperti yang dilakukan kepala delegasi Rusia, Konstantin Vorontsov ketika ia akan mengambil bagian dalam pertemuan Komite Perlucutan Senjata PBB.

Pada tahun 2019, lusinan anggota delegasi Rusia untuk Sidang Umum PBB ditolak visanya, dengan Washington

mengklaim bahwa mereka gagal memberikan dokumen yang diperlukan tepat waktu sesuatu yang dibantah oleh pihak Rusia.

Para kritikus mengutuk tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Markas Besar PBB-AS tahun 1947, yang memandangkan AS akan mengizinkan pejabat asing masuk ke negara yang menjadi tuan rumah markas besar PBB itu.

Khususnya, Bab 11 dari Persetujuan menyatakan bahwa: "otoritas federal, negara bagian atau lokal Amerika Serikat tidak akan memaksakan halangan apa pun untuk transit ke atau dari distrik markas perwakilan Anggota atau pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Selain itu, menurut Bab 13, undang-undang AS terkait masuknya orang asing tidak boleh diterapkan sedemikian rupa sehingga mengganggu hak-hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Bab 11.

"Ketika visa diperlukan untuk orang-orang yang disebutkan dalam bagian itu, mereka akan diberikan tanpa biaya dan secepat mungkin," bunyi dokumen itu. ● tom

Kim Jong-un: Hubungan Persaudaraan dengan Tiongkok Akan Tetap Abadi

SEOUL (IM) - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un menegaskan bahwa hubungan persaudaraan negara itu dengan Tiongkok akan berlanjut untuk generasi yang akan datang. Media pemerintah Korut melaporkan diktator muda itu menyerohi hubungan dekat antara negara tetangga. Kim Jong-un menggaris-bawahi seberapa dekat ikatan "dah" mereka, merujuk pada Perang Korea 1950-53. Dia mengatakan Tiongkok telah membantu negaranya dengan mengorbankan darah mereka ketika Korut menghadapi ujian terberat dan tersulit.

Pernyataan itu datang ketika pemimpin Korut itu mengunjungi Menara Persahabatan di Pyongyang pada hari Rabu (28/7) untuk memperingati ulang tahun ke-60 gencatan senjata. Pemimpin Korut itu menempatkan karangan bunga di dasar patung, "jiwa yang mulia dan eksploitasi orang-orang Tiongkok yang membantu perjuangan bersejarah yang sakral dan rakyat Korea dengan mengorbankan darah mereka ketika DPRK sedang menjalani cobaan yang paling keras dan paling sulit akan tetap abadi," kata Kim Jong-un.

"Persahabatan DPRK-Tiongkok yang dijalin sebagai ikatan persaudaraan akan diteruskan dengan kuat dari generasi ke generasi di jalan untuk tujuan bersama," imbuhnya menggunakan akronim dari nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea, seperti dikutip dari Express, Kamis (29/7).

Menara Persahabatan adalah menara yang didedikasikan untuk Tentara Relawan Rakyat Tiongkok yang berjuang dalam perang Korea yang berlangsung selama tiga tahun. Menara itu terletak di Taman Moranbong, Pyongyang. Didirikan pada tahun 1959, menara itu melambangkan hubungan erat antara kedua negara. Pyong-chol, wakil ketua Komite Sentral Partai Buruh serta pejabat lainnya.

Ini menandai ketiga kalinya Kim Jong-un mengunjungi monumen itu sejak ia memperoleh kekuasaan. Dia pertama kali berkunjung pada Juni 2019 saat kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Pemimpin itu kemudian kembali pada Oktober tahun lalu untuk menandai peringatan 70 tahun partisipasi Tiongkok dalam perang. Pernyataan pemimpin Korut itu muncul di tengah pembicaraan antara Korut dan Korea Selatan (Korsel) untuk membuka kembali kantor penghubung bersama yang diledakkan tahun lalu oleh Pyongyang. ● ans



UNJUK RASA ANTI PEMERINTAH DI KOLOMBIA

Pengunjuk rasa bentrok dengan anggota pasukan keamanan saat protes anti-pemerintah di Bogota, Kolombia, Rabu (28/7).

Serbu Kota, Kelompok Vigilante Meksiko Culik 21 Orang

MEXICO CITY (IM)— Ratusan pria bersenjata yang tergabung dalam kelompok vigilante atau main hakim sendiri yang baru dibentuk bernama "El Machete" telah menculik 21 orang saat menyerang sebuah kota di Meksiko selatan. Mereka juga membakar kendaraan dan setidaknya selusin rumah.

Kekacauan di Pantelho terjadi pada hari Senin ketika kelompok itu mulai turun ke jalan untuk memburu para tersangka penjahat. Kelompok "El Machete" sendiri baru diumumkan seminggu yang lalu, berjanji untuk memerangi serbuan kartel narkoba di komunitas pegunungan Chiapas yang

sebagian besar penduduk asli.

Seorang aktivis lokal, Pedro Gomez, mengatakan kepada AP setidaknya tiga kendaraan dan selusin rumah dibakar. Balai kota juga dirusak seperti dikutip dari Fox News, Kamis (29/7).

Para warga, yang tampaknya termasuk anggota kelompok Pribumi Tzotzil, menyebut diri mereka sebagai "kekuatan bela diri", sebuah fenomena yang terlihat selama bertahun-tahun di beberapa negara bagian Meksiko barat.

Seorang pejabat di kantor kejaksaan negara bagian Chiapas, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada Associated Press bahwa

penyelidikan atas peristiwa tersebut telah dibuka. Pejabat itu mengatakan orang-orang bersenjata itu anggota El Machete.

21 warga yang diculik dibawa ke San José Buena Vista Tercero, komunitas di mana kelompok main hakim sendiri diduga bermarkas. Pejabat itu mengatakan orang-orang bersenjata itu tampaknya mencari anggota kelompok lain yang disebut "Los Herreras."

Setelah El Machete mengumumkan kehadirannya awal bulan ini, Presiden Andrés Manuel López Obrador mengatakan dia tidak akan menerima kehadiran yang disebut pasukan bela diri. ● ans



SUASANA LOCK DOWN DI SYDNEY - AUSTRALIA

Seekor burung berjalan melewati stasiun kereta Circular Quay yang tenang selama penguncian untuk mengekang penyebaran wabah penyakit cirus corona (COVID-19) di Sydney, Australia, Rabu (28/7).



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
&
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Megapower Makmur Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") (selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, Pukul 10:15 WIB - 11.16 WIB yang bertempat di Hydro Meeting Room PT Megapower Makmur Tbk., Galeri Niaga Mediterania 2 Blok M6H, Jl. Pantai Indah Utara 2, Jakarta Utara 14460

Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah :

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Bp. TAN SRI DATUK TEE HOCK SENG, JP
Komisaris Independen	: Bp. LOW SOON HENG
	: Bp. TAN HON YIK

Direksi

Direktur Utama	: Bp. KANG JIMMI
Direktur	: Bp. DATUK MATTHEW TEE KAI WOON
Direktur	: Bp. ANG KIAM CHAI
Direktur Independen	: Bp. EMIL MALIK IBRAHIM

PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 692.273.289 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 85,2235% dari 816.997.053 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 696.265.689 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 85,2225% dari 816.997.053 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat dan Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam seluruh mata acara RUPST dan RUPS LB.

KEPUTUSAN RAPAT RUPST

Mata Acara Pertama Rapat :

- Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadjiwinata, Hadajat, Arsono, Retno, Pailaling & Rekan (PKF), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Kedua Rapat :

Menyetujui dan menetapkan Rugi Bersih perseroan sebesar (-)Rp. 4.994.595,- untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 sehingga tidak menyisihkan dana cadangan dan tidak memberikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020;

Mata Acara Ketiga Rapat :

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan menerima wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Keempat Rapat :

Menyetujui pemberian kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditulangnya RUPST ini sampai dengan Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahunan pada tahun 2026 dengan susunan lengkap sebagai berikut :

Komisaris Utama	: Bp. TAN SRI DATUK TEE HOCK SENG, JP
Komisaris	: Bp. LOW SOON HENG
Komisaris Independen	: Bp. TAN HON YIK
Direktur Utama	: Bp. KANG JIMMI
Direktur	: Bp. ANG KIAM CHAI
Direktur	: Bp. DATUK MATTHEW TEE KAI WOON
Direktur Independen	: Bp. EMIL MALIK IBRAHIM

KEPUTUSAN RAPAT RUPS LB

Mata Acara Pertama/Tunggal Rapat :

- Menyetujui perubahan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020");
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), termasuk menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan (jika diperlukan).

Jakarta, 30 Juli 2021
PT Megapower Makmur Tbk
Direksi